

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Pramono. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pembangunan Desa. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UMY, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Deliarnov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Echols, John M., dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Fayol, Henry. *General and Industrial Management*. Translated by Constance Storrs. London: Pitman Publishing, 1949.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ibrahim, Harmaily, dan Moh. Kusnardi. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 1988.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018. Jakarta.
- Kuznets, Simon. *Modern Economic Growth: Rate, Structure, and Spread*. New Haven: Yale University Press, 1966.
- Lilis Suryani. *Pengelolaan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.
- Mankiw, N. Gregory. *Principles of Economics*. 7th ed. Boston: Cengage Learning, 2015.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Montesquieu. *De l'esprit des lois*. Translated by Thomas Nugent. New York: Hafner Publishing, 1949.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Munawaroh. *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*. Malang: Inteligencia Media, 2022.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Samuelson, Paul A., dan William D. Nordhaus. *Economics*. 19th ed. New York: McGraw-Hill, 2010.
- Siagian, Sondang P. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Sinambela, Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Subandi. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukirno, Sadono. *Mikroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Syafrudin, Ateng. *Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Refika Aditama, 2000.
- Tahir, Arifin. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Terry, George R. *Principles of Management*. Homewood, IL: Richard D. Irwin, 1977.
- Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. *Economic Development*. 12th ed. Boston: Pearson Education, 2015.

B. Artikel Jurnal

- Ahmad, R., Gunawan, B. P., & Supangkat, A. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Keuangan Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 4, no. 1 (2021).
- Atmaja, Bagus Danu, Adul Khair, dan Johannes Johny Koynja. "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi di Desa Pengadang Lombok Tengah)." *Jurnal Diskresi*, no. 1 (2022):.
- Darmini Roza, dan Laurensius Arliman S. "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2017):
- Mochtar, Zainal Arifin. "Lembaga Negara dan Prinsip *Checks and Balances* dalam UUD 1945." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 2, 2010.
- Mokosuli, Stenly Vicky, Johannis E. Kaawoan, dan Welly Waworundeng. "Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Lobu Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara." *Jurnal Diskresi*, no. 2 (2022): .
- Muhammad Paizir, Minollah, Muh. Alfian Fallahiyah, dan Rachman Maulana Kafrarawi. "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam

- Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi di Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Lombok Utara).” *Jurnal Diskresi* 4, no. 1 (2025):.
- Posner, Richard A. “*The Economic Approach to Law.*” *Texas Law Review* 53, no. 4 (1975).
- Salman. “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Peningkatan dan Pemanfaatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Polewali Kabupaten Sinjai.” *Jurnal Ilmiah Administrasita* 12, no. 2 (2021):.
- Sutjiatmi, Sri, dan Tomy Wijayanto. “Analisis Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Penggunaan Dana Desa Tahun 2015–2016 Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan.” *Indonesian Governance Journal* 1, no. 1 (2018): 1.
- Taftiyan, Dhiya, Titin Rohayatin, dan Yamardi. “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan APBDes di Desa Sirnajaya Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat.” *Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2024).
- Tohawi, Agus. “Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia.” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 1 (2025).

C. Sumber Daring

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Majalengka, *Jumlah Desa yang Memiliki Bumdesa Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Majaengka, dataset*
https://opendata.majalengkakab.go.id/dataset/jumlah-desayang-memiliki-bumdesa-berdasarkan-kecamatan-di-kabupaten-majalengka?utm_source=chatgpt.com.
- KBBI Web. Entri “fungsi,” “kedudukan,” “maju,” dan “permusyawaratan.” Diakses 18 Januari 2026. <https://kbbi.web.id>.

D. Wawancara Pribadi

- Anwar, Maysyar Rizal. Perangkat Desa Ciparay. Wawancara oleh penulis Desa Ciparay, 10 Februari 2026.
- Drs. H. Suhardi, S.Pd M., Ketua BPD Wawancara oleh penulis Desa Ciparay 10 Februari 2026.
- Suharto, S.Pd., M.Si., Eman Suharto. Ketua BUMDES. Wawancara oleh penulis Desa Ciparay, 10 Februari 2026.
- Sujana. Anggota BPD Desa Ciparay. Wawancara oleh penulis, Desa Ciparay, 30 Oktober 2026.

E. Dokumen Hukum

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka. 2023. Profil Kemiskinan Kabupaten Majalengka 2023. Majalengka: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka. 2024. Kabupaten Majalengka dalam Angka 2024. Majalengka: Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka.
- Ciparay, 2025
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka. 2024. Fiqh Siyasah. Literatur Hukum Tata Negara Islam. Laporan Perkembangan BUMDes Tahun 2024. Majalengka: DPMD Kabupaten Majalengka.
- Munawaroh, M. *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*. Malang: Inteligensia Media, 2022, 23.
- Pemerintah Kabupaten Majalengka. (2023). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024. Lampiran Peraturan Bupati Majalengka Nomor 17 Tahun 2023. Majalengka: Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Profil Desa Ciparay Kabupaten Majalengka. Ciparay: Pemerintah Desa Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**